

ABSTRAK

Tujuan penelitian dalam penelitian ini ialah untuk menganalisa perlindungan konsumen terhadap penarikan paksa oleh pihak leasing dalam jaminan fidusia, kendala perlindungan konsumen terhadap penarikan paksa oleh pihak leasing dalam jaminan fidusia, dan menganalisa perlindungan konsumen terhadap penarikan paksa oleh pihak leasing dalam jaminan fidusia di masa yang akan datang.

Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis sosiologis, dengan metode penelitian deskriptif analitis. Data yang digunakan yaitu data primer dan sekunder yang akan dianalisis secara kualitatif. Permasalahan penelitian dianalisis menggunakan teori keadilan.

Hasil penelitian menyimpulkan bahwa Penarikan paksa yang dilakukan terhadap debitur baik fisik maupun mental akibat tidak diindahkannya keinginan pihak leasing. Ketika tindakan yang memiliki ancaman pidana tersebut dilakukan oleh *leasing*, maka tidak ada kata penghapusan pidana bagi mereka, kecuali dengan alasan-alasan tertentu. Seharusnya pihak pertama menggunakan jalur hukum yaitu melalui pengadilan dalam menyelesaikan masalah wanprestasi oleh pihak kedua, sehingga ada kekuatan tetap dalam melakukan penyitaan barang terhadap debitur apabila terjadi kredit macet. Pemanfaatan Jaminan Fidusia masih memiliki beberapa kendala di antaranya: 1). Pendaftaran Jaminan Fidusia. 2). Penarikan kendaraan yang dijamin. 3). Penghapusan Jaminan Fidusia setelah utang telah dilunasi. Perlindungan konsumen terhadap penarikan paksa dalam jaminan fidusia di masa yang akan datang hendaknya terus berkonsistensi dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (UUPK). Lahirnya Undang-undang ini memberikan harapan bagi masyarakat Indonesia, untuk memperoleh perlindungan atas kerugian yang diderita atas transaksi suatu barang dan jasa. UUPK menjamin adanya kepastian hukum bagi konsumen.

Kata Kunci : Perlindungan konsumen, Penarikan paksa, Fidusia

ABSTRACT

The research objectives in this study are to analyze consumer protection against forced withdrawals by leasing parties in fiduciary guarantees, consumer protection constraints against forced withdrawals by leasing parties in fiduciary guarantees, and to analyze consumer protections against forced withdrawals by leasing parties in fiduciary guarantees in the future.

This study uses a sociological juridical approach, with a descriptive analytical research method. The data used are primary and secondary data which will be analyzed qualitatively. The research problem was analyzed using the theory of justice.

The results of the study concluded that forced withdrawals were made to the debtor both physically and mentally due to the lack of heeding of the wishes of the leasing party. When the action that has a criminal threat is carried out by leasing, then there is no word for criminal abolition for them, except for certain reasons. The first party should use legal channels, namely through the courts in resolving the problem of default by the second party, so that there is permanent power in confiscation of goods against debtors in the event of bad credit. The use of Fiduciary Guarantees still has several obstacles, including: 1). Fiduciary Guarantee Registration. 2). Guaranteed vehicle withdrawals. 3). Elimination of Fiduciary Guarantee after the debt has been repaid. Consumer protection against forced withdrawals in fiduciary guarantees in the future should continue to be consistent with Law Number 8 of 1999 concerning Consumer Protection (UUPK). The enactment of this law provides hope for the people of Indonesia, to obtain protection for losses suffered by transactions of goods and services. UUPK guarantees legal certainty for consumers.

Keywords: Consumer protection, Forced withdrawal, Fiduciary

UNISSULA
جامعة سلطان أبوبوع الإسلامية